

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR.

Oleh : Azuraili

Email : azurailistudentunri@gmail.com

Pembimbing: Zulkainain, S.Sos, M.Si

Jurnal Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax0761-63272

Abstract

Forest fire is the burning of forest area both large and small. Forest fires often occur and if they do they will burn anything nearby and follow the direction of the wind. Fire it self can occur because of two things, namely natural fires and fires caused by humans. Forest fires occur every year during the dry season. In Rokan Hilir Regency, Riau Province between 2013-2017, forest fires almost occurred throughout the year. The problem of forest fires is supported by the weak economic conditions of the community and the low level of community education which greatly affects the management of resources and the environment. So the need for empowerment efforts with the main goal is to improve the quality of life of the community. The participation of local communities in the context of preventing forest and land fires is very important. The success of forest and land fire prevention activities is highly dependent on the success of bringing local people into emotions, feelings and enthusiasm to maintain forest sustainability because the community is more in control of the location and is expected to have more responsibility because the extinguished area is the community area. The direct involvement of the community in a land and forest fire control activity can also encourage public awareness of the importance of controlling forest and land fires and can also encourage community awareness of the importance of fire control early around their area.

Success in community empowerment in preventing forest and land fires in Kubu Subdistrict, Rokan Hilir Regency is the encouragement of the community to the importance of controlling forest and land fires early around their area through the formation of fire-fighting teams at the community level or anti-fire community groups that functioned to tackle forest and land fires since early in the area.

The results of the study are the implementation of community empowerment in preventing forest and land fires in Kubu District, Rokan Hilir Regency, which is still less than optimal because there are still obstacles in the field, therefore there are four principles that are often used in the success of empowerment programs, namely the principle of equality, the principle of participation, self-sufficiency or independence. So that community empowerment in preventing forest and land fires in Kubu Rokan Hilir District can run optimally so that the creation of people who are empowered in preventing forest and land fires.

Keywords: Forest and land fires, Empowerment, and Community.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dalam UU Nomor 23 tahun 2014 pasa 1 ayat (6) dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam setiap kegiatan pemerintah, maka perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama.

kebakaran hutan hampir terjadi sepanjang tahun. Tahun 2013 terjadi kebakaran 20 Ha yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit. Berikutnya tahun 2014 sedikitnya 250 Ha hutan ludes dilalap si jago merah. Tahun 2015 terjadi peningkatan kebakaran hutan menjadi 100 Ha. Selanjutnya tahun 2016 kondisi kebakaran hutan semakin parah karena areal yang terbakar mencapai 75 Ha dan tahun 2017-2018.

Dalam konteks berkelanjutan hutan dan lahan, maka untuk pencegahan kebakaran diperlukan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat (Zulkarnaini, 2018).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokahn Hilir yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rokan Hilir diantaranya adalah dengan

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

pembentukan regu penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Pembentukan regu ini mempunyai tugas dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 tahun 2011. Melakukan tindakan operasional pemadam secepat mungkin diwilayahnya.

Peran serta masyarakat setempat dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat penting. Suksesnya kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat teragntung pada keberhasilan membawa serta masyarakat lokal dalam emosi, perasaan dan semangat untuk mempertahankan kelestarian hutan, karena masyarakat lebih menguasai lokasi dan diharapkan lebih mempunyai tanggung jawab karena areal yang dipadamkan adalah areal masyarakat Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim pemadam kebakaran ditingkat masyarakatatau kelompok masyarakat anti api.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu kegiatan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan yang diintegrasikan dengan tujuan pencegahan kebakaran hutan. Dari penjelasan dan fenomena di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

2. Apa saja yang menjadi hambatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi khususnya kebijakan publik dan menambah informasi kajian

3. KONSEP TEORI

Prinsip pemberdayaan masyarakat ada empat prinsip yang sering dipakai dalam mensukseskan program pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan Najiati (2013). Dari masing-masing prinsip tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan
Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau

ilmu tentang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran hutan dan bagi pihak lain yang membutuhkan penelitian ini.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik pada laki-laki ataupun perempuan. Dinamika yang dibangun dengan pengembangan mekanisme dari pengetahuan, pengalaman dan juga keahlian satu sama lainnya.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipasif, terencana, dilakukan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai ditingkat tersebut

membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tertinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan / Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit. Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah usahanya, tahu tentang kondisi lingkungannya, mempunyai tenaga kerja dan kemauan serta mempunyai norma-norma bermasyarakat yang telah dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Proses pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan dari pada masyarakat sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola aktivitas sendiri.

Pemberdayaan sangat menekankan pada pentingnya penglibatan masyarakat (Huraerah, 2012) baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan, maupun

pada tahap pengembangannya. Pemberdayaan selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan kemahiran. Sumber dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya berasal dari anggaran pemerintahan, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

Wilson dalam Kartika (2012) mengemukakan bahwa ada empat tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu :

1. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini, masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimilikinya serta rencana dan harapan mereka akan kondisi yang lebih baik .
2. *Understanding*, pemahaman, yaitu pemberian pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
3. *Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
4. *Using* atau menggunakan ketrampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyektif yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif. Hasil peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Kubu Kabupaten rokan hilir.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Alasan penulis tertarik memilih lokasi penelitian ini karena dari data yang saya dapat kan di dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) dari 13 kecamatan yang sering terjadi peristiwa kebakaran hutan di Rokan Hilir salah satunya di Kecamatan Kubu.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Moleong (2014). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. metode *purposive sampling* adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dipilih informan-informan yang mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Oleh Karen itu peneliti

menetapkan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir
- c. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu
- d. Pemilik lahan

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memerlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Adapun jenis data dan sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data **sugiyono (2007:156)**. Data sekunder yang digunakan peneliti terdiri:

- 1.gambaran umum mengenai dinas BPBD (badan penanggulangan bencana daerah)
- 2.hasil laporan dari dinas BPBD

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang kita teliti, istilah sederhananya adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dijadikan objek penelitian yang memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara mendalam sering digabungkan dengan teknik observasi. Karena selama pengamatan berlangsung, peneliti pun melakukan wawancara dengan informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan untuk memperoleh data dan memahami pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa file, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi disini berbentuk Foto-foto mengenai Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles and Huberman, yang disebut sebagai interactive model of analysis. Analisis dan interaktiv ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian diadakan penelitian pemetaan atau diskripsi tentang data tersebut kedalam apa yang disebut matriks. Dengan memanfaatkan matriks yang dipetakan maka peneliti mulai mengadakan analisis apakah membandingkan, melihat urutan atukah menelaah hubungan sebab-akibat sekaligus (moleong,2004:308) menurut bukunya sutopo dalam sugandi (2011) model ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu data display, dan conclusion drawing, untuk lebih jelasna maka perlu diuraikan ketiga komponen kegiatan tersebut yaitu:

- a. Reduksi data, adalah proses mempertegas, memperpendek, menyeleksi, membuat fokus, membuang yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
- b. Penyajian data, yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi akan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

- c. Kesimpulan data, dalam awal pengumpulan data peneliti harus sudah mengerti hal-hal apa yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin kearah sebab akibat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memungkinkan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Pemberdayaan masyarakat ada empat prinsip yang sering dipakai dalam mensukseskan program pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi keswadayaan atau kemandirian yang berkelanjutan Najiati dkk, (2013:54).

4.1.1 Prinsip Kesetaraan

Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik pada atasan ataupun bawahan.

4.1.2 Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipasif, terencana, dilakukan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai ditingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tertinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

4.1.3 Prinsip Keswadayaan / Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit. Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah usahanya, tahu tentang kondisi

lingkungannya, mempunyai tenaga kerja dan kemauan serta mempunyai norma-norma bermasyarakat yang telah dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan.

4.1.4 Prinsip Berkelanjutan .

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau laut dan udara. Sehingga di butuhkan pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan agar kegiatannya bisa berjalan secara terus menerus dan bermanfaat dalam waktu yang panjang.

Proses pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan dari pada masyarakat sendiri tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola aktivitas sendiri.

4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

4.2.1 Kondisi ekonomi masyarakat.

Kebakaran hutan yang selalu berulang setiap tahun terakhir ini berkaitan dengan kondisi ekonomi

masyarakat yang ada. Kondisi ekonomi yang memaksa mereka harus melakukan penebangan secara liar untuk membuka lahan pertanian. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang panas menyebabkan tanah menjadi kering dan mudah terbakar.

4.2.2 Keterbatasan Dana

Sejauh ini yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah mengumpulkan masyarakat sekitar lokasi kebakaran, serta bergotong royong untuk mematikan api dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti: timba, ember dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan selama ini masyarakat belum banyak mengetahui seperti apa keterlibatan yang harus mereka lakukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani kebakaran, Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat dapat menggunakan alat-alat semi mekanis sebagai alat pemadaman api seperti mesin air.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat di daerah kebaruan hutan sangat penting, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasar memberdayakan masyarakat di daerah kebaruan hutan adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir kawasan kebaruan hutan. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat di lingkungan kebaruan hutan sulit untuk diwujudkan. Dengan kata lain, keberdayaan harus dicapai melalui peningkatan kapasitas dan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat di lingkungan kebaruan hutan ditujukan untuk membangun kesadaran, motivasi, kompetensi, dan kemandirian masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri

sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran.

Menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini bisa dibuktikan dengan menerima pandangan, pendapat, pengalaman, pengetahuan, atau memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak memiliki uang, tapi mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sumberdaya lain. Untuk itu, tampilkanlah dukungan yang bisa mereka berikan. Jangan menganggap remeh sumbangan mereka yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Buatlah mereka bangga atas apa bisa mereka sumbangkan. Untuk itu masyarakat sangat perlu di beri pelatihan-pelatihan yang bersifat pengetahuan mengenai kebaruan hutan dan lahan.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebaruan hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Rokan Hilir.

Memberdayakan masyarakat di lahan kebaruan hutan memang bukan sesuatu hal yang mudah. Permasalahan yang umumnya dihadapi antara lain Kondisi ekonomi masyarakat, Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, Keterbatasan fasilitas, dan Keterbatasan Dana.

Kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa mereka untuk melakukan pembakaran hutan dan

lahan. Tujuannya untuk membuka lahan perkebunan. Pembakaran hutan adalah cara yang paling murah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit sekaligus mendongkrak harga lahan. Setelah di tanami sawit maka harga lahannya lebih menghasilkan atau berguna bagi kebutuhan ekonomi mereka. Karenanya banyak masyarakat yang menderita akibat kabut asap, dan sekelompok orang justru mengejar keuntungan ekonomi dari pembakaran seperti kelompok tani, pengkliman lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit.

Ketidak tahuan masyarakat akan dampak kebakaran hutan yang membuat mereka menanggung akibat dari hutan yang terbakar. Tingkat pendidikan yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menjaga kelestarian hutan yang ada. masyarakat harus di bimbing hingga mencapai titik kemandirian, pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaannya, seringkali diperlukan pemberian bantuan berupa sarana seperti modal stimulan dan sarana konservasi lahan. Diperlukan strategi khusus agar pemberian bantuan dalam bentuk sarana semacam ini betul

betul sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong proses pemberdayaan. Kebakaran lahan sering terjadi saat musim kemarau setiap tahunnya. Untuk itu pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan dana untuk kebakaran hutan dan lahan sebelum musim kemarau tiba.

5.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, perlu dikemukakan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Mendesak badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Rokan Hilir agar mengontrol kondisi masyarakat agar tujuan akhir dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan hilir bisa tercapai yaitu masyarakat bisa mandiri dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat harus di beri pengetahuan seputar menangani masalah kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Agar badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam sifat praktis dengan cara memberikan terampilan dalam mencegah kebakaran, memeberikan pengetahuan karakteristik, sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugroho W.C, I N.N, dkk. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. (Bogor: Wetlands International,2004) Him.7
- Aziz, Moh. Ali dkk 2005 *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodolog*. Yogyakarta, PT.LkiS PELANGI Nusantara.
- Emmy Susanti Hendraso, 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar, Trenada Mendia: Jakarta*.
- Hikmat Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:
- Pramana Y. 2012. “ Bentuk dan Tingkat Pratisipasi Stake holder dalam Pengelolaan Cagar Biosfer Diam Siak Kecil-Bukit Batu Profinsi Riu”. Tesis. Bogor: Instistut Pertanian Bogor.
- Riadi dan Dedi. 2005.*Perencanaan Pembangunan Dearah: Strategi Mengali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Dearah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005 *Penrencanaan Pembangunan Dearah Otnom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra utama.
- Sumber: Laporan Akhir Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir.
- Soetomo, 2011.*Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya*. Yogyakarta Pelajar.
- Sumaryadi, 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan Dengan Perinsip Permedayaan Masyaraka*.Jakarta. PT Alex Media
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemerdyaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Radja Grapindo Persada. Jakart
- Mardikanto, P. 2009. *Sistem Penyuluhaan Pertanian*. Sebelas maret Universty Press. Surakarta.
- Mustangin. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbaris Potensi Lokal Desa Wisata Di Desa Bumiaji*. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2(1), 59-72,
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen. Teori, Praktik, dan riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta .
- Wrihatnolo, Randi dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemerdayaan Sebuah Pengantar Untuk Pemerdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Kutindo.

JURNAL

- Dwiyanto, D. (2015). *Pemerdayaan Mayarakat dan Pengembangan*

Kapasitas Dalam
Penanggulangan Melalui
ENPN Mandiri Perkotaan.
MAKSIPRENIUN, III (1)
36-51.

Indarwari. (2017). Strategi
Pelaksanaan Tim Pemerdayaan
Kesejahteraan Keluarga (pkk)
dalam Meningkatkan
Pemerdayaan Perempuan Di
Kecamatan Samarinda Utara.
Ilmu Pemerintahan, V (2),
861-872.

Zulkarnaini, pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan Ekosistem
Rawa Gambut yang Rawan
Kebakaran di Provinsi Riau,
Tepatnya di Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir.

Skripsi

Edris Tata. (2016). Partisipasi
Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Program Pengembangan
Pemerdayaan Masyarakat
Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan
Glalela Barat Kabupaten
Halmahera Utara. UNSTRAT.

Amin Rizwan Muhammad. (2013).
Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir Kebakaran Hutan
dan Lahan Tahun 2015. UNRI.

DOKUMEN

Inpres No. 16 Tahun 2011 tentang
peningkatan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan keputusan Presidean
No. 10 Tahun 2000

Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Satuan
Pelaksana Pengendalian Kebakaran
Hutan atau Lahan Kabupaten Rokan
Hilir

Peraturan Gubernur Riau No. 43
Tahun 2009 Uraian Tugas Dinas
Kehutanan Provinsi Riau undang
undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.

Undang – undang No. 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan